

BAB IV

LEMAHNYA OPOSISI INTERNAL YANG MENENTANG TRANSFORMASI PKK

PKK mulai mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2000-an. perubahan yang demikian besar tidak lain dikarenakan beberapa peristiwa penting, mulai dari gencarnya operasi kontra-teroris yang dilakukan oleh pemerintah Turki yang meninggalkan banyak kerugian dari PKK, hingga ke peristiwa besar penangkapan pemimpin besar PKK, Abdullah Ocalan di Kenya oleh otoritas Turki atas bantuan AS. Hal ini menjadi pukulan telak bagi PKK mengingat peran Ocalan yang dominan dalam menentukan arah organisasi ini.

Tertangkapnya Ocalan ternyata tidak serta merta membuat PKK hancur seperti apa yang diprediksi oleh pemerintah Turki. Sebaliknya, Ocalan bahkan mampu mengendalikan organisasinya dari dalam penjara melalui pengacaranya hingga saat ini. Instruksi Ocalan kepada PKK untuk menghentikan serangan dan mundur dari negara Turki juga diikuti, meskipun beberapa militan tidak setuju dengan perintah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tertangkapnya Ocalan bukan berarti akhir bagi PKK, melainkan awal perjuangan baru bagi PKK. Adanya klaim Ocalan untuk mulai menggunakan cara damai dalam menyelesaikan permasalahan Kurdi di Turki ditindaklanjuti dengan dibentuknya KADEK pada tahun 2002.

Dua tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2004, Ocalan kembali mengganti nama PKK dari KADEK menjadi KKK (*Koma Komalen Kurdistan*) atau *Confederation of Soecieties of Kurdistan*. KKK lebih memfokuskan pada posisi *pan-kurdish* sementara pada saat yang sama menyuarakan isu perbedaan masyarakat di Kurdistan. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, PKK akhirnya kembali berganti nama menjadi *Koma Civaken Kurdistan* (KCK) atau *Confederation of Communities of Kurdistan*. Organisasi ini lahir berdasarkan apa yang disebut sebagai “*KCK Sözleşmesi*” atau *KCK agreement* yang ditulis dalam bahasa Turki yang merupakan bahasa organisasi ini.¹⁰¹

PKK telah mengalami berbagai macam tantangan dalam upayanya untuk mendapatkan kebebasan bagi etnis Kurdi di Turki. Beberapa dekade perjuangan telah membuat PKK melakukan berbagai taktik, mulai dari taktik perjuangan bersenjata hingga melalui jalur politik. Abdullah Ocalan membagi periode perjuangan PKK ini kedalam tiga periode yang berbeda. Seperti dikutip dari Duran Kalkan¹⁰² melalui situs pkkonline.com, periode pertama perjuangan PKK dimulai pada 1973-1983 yang merupakan periode formasi dari PKK. Selama periode ini, garis politik dan ideologi PKK telah membentuk inti partai, hubungan public, serta bentuk perlawanan yang mereka gunakan.

Periode kedua adalah tahun 1984-1993 yang merupakan periode untuk memulai perjuangan pembebasan nasional yang dimulai dengan perjuangan gerilya. Sedangkan periode ketiga adalah dari 1993 hingga 2003. Periode ini berakhir setelah penggulingan Sadam Hussein diikuti intervensi AS ke Iraq serta kemunculan AKP dengan kekuatannya pada 2003. Intervensi AS tidak hanya di

¹⁰¹ Wolfgang Taucher et.,2015.*The Kurds: History, Religion, Language, Politics*.

¹⁰² Duran Kalkan adalah anggota dari dewan eksekutif KCK dan merupakan salah satu anggota inti dari dari PKK pada masa awal terbentuknya.

Iraq saja, tetapi juga di seluruh Timur Tengah yang juga menghambat pergerakan PKK.¹⁰³ Periode ketiga ini juga mengawali perubahan yang besar dalam tubuh PKK yang mulai fokus untuk menggunakan jalur politik dalam memecahkan permasalahan Kurdi di Turki.

Sedangkan periode yang saat ini dimasuki oleh PKK adalah periode untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan kebebasan mereka sendiri. Dalam periode ini PKK berusaha untuk mengubah sistem yang selama ini membuat hak-hak etnis Kurdi tidak diakui.¹⁰⁴ Perjuangan yang telah dilalui PKK hingga sampai saat ini telah membuat mereka mengubah tujuan dan orientasinya.

Perubahan pemikiran yang dialami oleh Ocalan pada kenyataannya memunculkan penolakan dari dalam internal PKK itu sendiri. Setelah Ocalan menginstruksikan PKK agar menarik mundur militannya dari negara Turki dan menghentikan serangan pada Agustus 1999, sebetulnya telah muncul beberapa penolakan dari para militan PKK itu sendiri. Akan tetapi penolakan-penolakan ini mampu diredam atas perintah dari Ocalan. Pengaruhnya yang begitu besar dalam PKK mampu mempertahankan organisasi ini ditengah-tengah kebingungan dan kegoyahan PKK paska penangkapannya.

Keputusan Ocalan yang begitu tiba-tiba membuat terkejut para militan PKK. Salah satunya datang dari seorang militan PKK bernama Neval yang sangat menyesalkan instruksi Ocalan untuk menghentikan serangan kepada pemerintah Turki. Menurutnya, keputusan ini bukanlah strategi PKK, melainkan keputusan Ocalan sendiri. Neval berharap *presidential council*, yakni sebuah dewan yang dibentuk untuk mengimplementasikan keputusan Ocalan agar menolak keputusan

¹⁰³ Diakses pada 10 Maret 2017 jam 2:47 melalui, <http://www.pkkonline.com/en/index.php?sys=article&artID=34>

¹⁰⁴ *Ibid.*

personal ini. akan tetapi, dewan ini nyatanya tidak bisa berbuat banyak untuk menolak instruksi Ocalan. Salah satu penyebabnya antara lain karena beberapa anggota dewan merupakan mereka yang telah bersama dengan Ocalan sejak dari awal, seperti Cemil Bayik.¹⁰⁵

Rozerin, seorang militan perempuan PKK menyatakan bahwa tidak seorangpun, baik itu dari level yang tertinggi sampai paling rendah sekalipun dalam PKK yang memandang benar keputusan Ocalan ini.¹⁰⁶ Akan tetapi, menentang keputusan Ocalan akan dianggap sebagai tindakan ketidaksetiaan terhadap PKK. Beberapa militan yang khususnya telah berpengalaman dalam setiap pertempuran dan melihat banyak teman seperjuangannya mati demi kemerdekaan Kurdistan sangat menolak ide Ocalan ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan PKK.

Rozerin adalah salah satu yang yang menolak keputusan ini. Dia telah menjadi militan PKK sejak umur 12 tahun dan telah melalui banyak pertempuran untuk kemerdekaan Kurdistan. Nama lainnya yang menolak keputusan ini adalah Mehmet Can Yuce, yang sejak 1980 telah dipenjara akibat dukungannya terhadap PKK. ide baru Ocalan untuk menghentikan perjuangan bersenjata dan memulai sebuah integrasi baru membuatnya marah dan memutuskan untuk meninggalkan PKK. Menyadari hal ini, ocalan akhirnya menyerukan untuk tidak tertipu oleh apa yang disebutnya konspirasi dari kelompok Yuce dan agen-agen lainnya.¹⁰⁷

Para anggota PKK yang melarikan diri tidak hanya berasal dari anggota senior militan. Para pejuang PKK pun mulai meninggalkan organisasi dan memulai hidup baru di kota-kota Kurdi, Iraq Utara. Pada akhirnya, tindakan ini

¹⁰⁵ A. Marcus, *Op. Cit.* hal. 286

¹⁰⁶ *Ibid.* hal. 287.

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 288.

sangat beresiko karena para loyalis Ocalan berusaha untuk menghukum mantan kawan seperjuangan mereka.¹⁰⁸

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa sebetulnya keputusan Ocalan untuk mengubah orientasi PKK ini sangat ditolak oleh anggota PKK. Akan tetapi, pengaruh Ocalan yang begitu besar membuat penolakan ini tidak berarti apa-apa karena sekali mereka melawan, maka mereka akan dihabisi. Terlebih lagi, beberapa orang penting dalam *presidential council* adalah orang-orang terdekat Ocalan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpin mereka. Lemahnya oposisi ini akhirnya membuat keputusan Ocalan dapat terlaksana dan tanpa menimbulkan kehancuran PKK itu sendiri.

PKK pada akhirnya menjadi sebuah gerakan sosial yang berusaha untuk mewujudkan tujuan bersama mereka dengan cara membangun solidaritas bersama tidak hanya etnis Kurdi di Turki, melainkan di empat wilayah Kurdistan. Mereka bersatu untuk menuntut sebuah klaim yang disebutnya sebagai *democratic autonomy*. Lemahnya oposisi internal dalam PKK membuat Ocalan berhasil melakukan perubahan dalam dua hal, yaitu perubahan ideologi serta restrukturisasi organisasi PKK.

A. PERUBAHAN IDEOLOGI PKK

Dalam perjuangan nasional Kurdi, hingga tahun 1999 PKK telah menjalani pertempuran yang keras melawan pemerintah Turki demi mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Kurdi di Turki. Pada saat itu PKK menggunakan ideologi *Marxist-leninist* dengan dukungan dari berbagai

¹⁰⁸ *Ibid.* hal. 291.

negara yang beraliran kiri seperti Uni Soviet. PKK juga melakukan pertempuran dengan gaya *maoist* melalui perang gerilyanya dan digabungkan dengan nasionalisme Kurdi yang kuat.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, PKK akhirnya ikut berubah. Perubahan ini tidak bisa dilepaskan oleh tokoh besar PKK, Abdullah Ocalan yang merupakan penentu sebagian besar keputusan organisasi. Tertangkapnya Ocalan pada tahun 1999 oleh pemerintah Turki akhirnya menuntut Ocalan untuk kembali melakukan evaluasi terhadap PKK. Dari awal tertangkapnya Ocalan, hingga perubahan drastis terhadap tujuan awal PKK tidak lain disebabkan oleh perubahan ideologi yang dipegang oleh Ocalan sebagai motor utama penggerak PKK.

PKK adalah sebuah partai stalinis yang memulai perang gerilya pada tahun 1980 hingga 1990-an. Organisasi ini pada awalnya memiliki struktur yang kepemimpinan yang otoriter serta fokus menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kebebasan bagi bangsa Kurdi di Turki. Sifat seperti inilah yang akhirnya membuat perjuangan PKK mengalami stagnasi pada tahun 1990-an sebelum penangkapan Ocalan tahun 1999. Namun, tertangkapnya Ocalan ini bukan menandakan berakhirnya perjalanan PKK. Faktanya, Ocalan terpaksa harus menerima kegagalan ideologi marxis-Leninis serta tujuan awal dari PKK.

Ocalan membaca kembali pemikiran marxis dan kemudian secara fundamental mengubah visinya tentang kemerdekaan. Ocalan merumuskan pandangan baru untuk menutupi kekurangan partainya di masa lalu. Salah satu nama pemikir terkenal yang disebut-sebut memberikan pengaruh besar terhadap berubahnya pemikiran Ocalan adalah **Murray Bookchin**, seorang sosialis libertarian yang tinggal di AS. Sama halnya dengan Ocalan, Bookchin awalnya

adalah seorang penganut marxis yang akhirnya berhasil mengembangkan teorinya sendiri. Menurutnya, perjuangan untuk menyelamatkan ekosistem memiliki sebuah dinamika anti-kapitalis serta bisa menyatukan dunia yang tereksplorasi dan terasing.¹⁰⁹

Visi Bookchin ini adalah sebuah masyarakat yang dirampingkan secara radikal, diatur dalam sebuah otonomi daerah dan kota yang secara ekologis berkelanjutan. Kota-kota yang disebut sebagai “komune” ini akan menggantikan pusat kota, yang mana dipercaya oleh Bookchin sebagai ancaman bagi lingkungan dan halangan bagi terwujudnya demokrasi langsung. Untuk mewujudkan masyarakat seperti ini, Bookchin menawarkan sebuah kombinasi dari tindakan politik dan pengorganisasian prefiguratif seperti struktur koperasi dan asosiasi demokratis yang bisa memberikan tanda bagi sebuah masyarakat yang lebih baik. Tindakan politik dan eksperimen terhadap hal-hal ini menurut Bookchin nantinya akan mulai memberdayakan orang-orang biasa dalam komunitas mereka.¹¹⁰

Pemikiran Bookchin ini menarik bagi Ocalan yang saat itu sedang mencoba mencari solusi baru terhadap tujuan dan orientasi organisasinya dengan ide yang serupa dengan sosialisme libertarian. Ide ini kemudian disebut oleh Ocalan sebagai “*democratic confederalism*”. Tidak lama setelah menciptakan ideologi baru ini, Ocalan kemudian membagikan pemikirannya tersebut kepada PKK melalui pengacaranya yang nantinya mereformasi teori dan praktek organisasi.

¹⁰⁹ Diakses pada Sabtu, 11 Maret 2017 jam 7:40 melalui, <https://www.jacobinmag.com/2016/03/pkk-ocalan-kurdistan-isis-murray-bookchin/>

¹¹⁰ *Ibid.*

1. Libertarian Municipation Murray Bookchin

Murray Bookchin adalah seorang immigran Yahudi Rusia yang lahir di New York pada tahun 1921. Ketergabungannya dengan kelompok *Young Pioneers*, sebuah organisasi pemuda komunis pada umur 9 tahun membuatnya mulai mengenal politik radikal. Hal ini merupakan awal dari hidupnya untuk menganut aliran kiri dimana dia mulai menyebut dirinya sebagai seorang *anarchist* pada akhir tahun 1950-an dan akhirnya kembali mengklaim dirinya sebagai seorang *communist* atau *libertarian municipalist* setelah berkenalan dengan ide sosial ekologi.¹¹¹

Bookchin menentang ide-ide dan praktek gerakan *environmentalist* yang muncul dan menuduh mereka hanya menganjurkan “perbaikan teknis” terhadap kapitalisme, bertentangan dengan pendekatan ekologis yang berusaha untuk mencari penyebab utama dari masalah sistemik. Menurut pandangan Bookchin, kesalahan fatal kapitalisme bukan terletak pada eksploitasi kelas pekerja seperti yang dipercaya oleh kaum Marxis, melainkan terletak pada konflik dengan lingkungan alam, yang jika dibiarkan berkembang tanpa lawan akan mengarah pada dehumanisasi manusia serta kerusakan alam.¹¹²

Kapitalisme telah melahirkan kerusakan besar pada alam, mulai dari industri pertanian yang mencemari tanaman dan orang dengan bahan kimia beracun, membuat kota sedemikian besar, memutus hubungan dengan alam, serta mengubah manusia menjadi robot dan merusak baik tubuh maupun jiwa mereka. Untuk menciptakan sebuah masyarakat ekologis, kota-kota harus di desentralisasikan, sehingga setiap orang bisa hidup pada skala yang kecil dan

¹¹¹ *Murray Bookchin and kurdish Resistance*, diakses pada 11 Maret 2017 jam 14:40 melalui <https://roarmag.org/essays/bookchin-kurdish-struggle-ocalan-rojava/>

¹¹² *Ibid.*

memerintah diri mereka sendiri, memproduksi makanan secara lokal, serta menggunakan energi yang bisa diperbarui. Masyarakat baru akan dibimbing, bukan oleh perintah dari pasar maupun oleh otoritas negara, melainkan oleh keputusan rakyat. Adapun keputusan mereka akan dipandu oleh etika pada sebuah skala komunal.¹¹³

Untuk menciptakan masyarakat ekologis yang rasional dibutuhkan apa yang Bookchin sebut sebagai “*forms of freedom*”. Organisasi revolusioner dan institusi bagi masyarakat yang baru akan benar-benar menjadi pembebas sehingga tidak akan menjurus pada *stalin* yang baru atau tirani yang baru atas nama sosialisme sehingga cukup kuat untuk menekan kapitalisme. Lembaga-lembaga tersebut haruslah berbentuk majelis demokratis. Konsep negara bangsa saat ini harus dihilangkan dan kekuasaannya harus diserahkan kepada warga negara dalam majelis. Orang-orang selain ahli dalam industri bisa membuat keputusan, dan karena majelis hanya bekerja di suatu daerah atau tingkat lokal, mereka harus bersatu bersama dalam konfederasi agar dapat berfungsi di wilayah geografis yang lebih luas.¹¹⁴

Bookchin menghabiskan beberapa dekade mengelaborasi ide-ide ini bagi terbentuknya masyarakat ekologis yang demokratis. Pada tahun 1980-an, dia menyatakan bahwa konfederasi majelis rakyat akan membentuk *counter power* atau kekuasaan ganda terhadap negara-bangsa. Program ini disebutnya sebagai *libertarian municipation*, yang kemudian diganti dengan sebutan *communalism*. Bookchin mulai mengembangkan idenya tentang demokrasi langsung menjadi lebih spesifik dengan memberinya nama *libertarian municipation* pada awal

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Bookchin, Öcalan, and the Dialectics of Democracy*, diakses pada 22 Desember 2016 jam 16:22 melalui, <http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy>

tahun 1980. *Libertarian municipation* adalah strateginya untuk mencapai lembaga revolusioner demokratis serta infrastruktur politik dari masyarakat ekologis yang rasional. Bookchin berargumen bahwa dunia membutuhkan ‘politik baru’ yang tidak berdasarkan pada hukum negara, melainkan pada level masyarakat, dimana kehidupan pribadi perlahan mulai berganti menjadi kehidupan publik dan mampu menggantikan negara-bangsa.¹¹⁵ Lebih jauh, Bookchin menjelaskan apa yang dimaksud dengan *confederalism*.

“What, then, is confederalism? It is above all a network of administrative councils whose members or delegates are elected from popular face-to-face democratic assemblies, ... The members of these confederal councils are strictly mandated, recallable, and responsible to the assemblies that chose them for the purpose of coordinating and administering the policies formed by the assemblies themselves. Their function is thus a purely administrative and practical one, not a policy-making one like the function of representatives in republican systems of government.”¹¹⁶

Libertarian Municipation mempromosikan penggunaan majelis tatap muka langsung untuk mengambil praktek politik dari profesional, politisi, dan menemukannya kembali di tangan warga. Bookchin menggambarkan negara sebagai suatu formasi yang asing, dan sebuah duri dalam pembangunan manusia. Karena itu dia memperkenalkan *libertarian municipation* sebagai “demokrasi pada intinya dan non-hirarkis pada strukturnya, serta didasarkan untuk mewujudkan sebuah masyarakat ekologis dan rasional.

Dalam essay berjudul *The Ecological Crisis and the Need to Remake Society* yang dibuat Bookchin pada tahun 1992 terdapat argumennya yang mengatakan bahwa pesan yang paling mendasar dari kemajuan sosial ekologi adalah gagasan mendominasi alam berasal dari dominasi manusia dengan

¹¹⁵ Janet Biehl. 2007. *Bookchin Breaks with Anarchism*. Diakses pada Kamis, 22 Desember 2016 jam 00:47 melalui, <https://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-anarchism>

¹¹⁶ Murray Bookchin, *The Meaning of Confederalism*. diakses pada 22 Desember 2016 jam 14:25 melalui, <https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-the-meaning-of-confederalism>

manusia. Bagi masyarakat ekologis, dominasi antar manusia harus diberantas. Bookchin selanjutnya mengatakan bahwa kapitalisme telah membawa semua permasalahan bersejarah tentang dominasi pada puncaknya, dan ekonomi pasar akan menghancurkan lingkungan alam jika tidak dihentikan sebagai hasil dari ideologi “tumbuh atau mati”.¹¹⁷

Selama bertahun-tahun, Bookchin telah berusaha untuk meyakinkan kaum *anarchist* di AS tentang ide *libertarian municipation* yang menurutnya adalah kunci untuk membuat *anarchisme* menjadi relevan lagi baik secara politik maupun sosial. Hal ini dalam bahasanya sendiri berarti berusaha untuk merebut kembali ruang publik untuk menjalankan kewarganegaraan otentik sementara melepaskan diri dari siklus suram parlementarisme dan kebingungan dalam mekanisme partai sebagai sarana representasi publik. Bookchin berusaha melakukan berbagai cara untuk meyakinkan kaum *anarchist*, namun peristiwa tertangkapnya Ocalan tahun 1999 akhirnya membuat Bookchin mengakui bahwa dia sudah gagal dan mulai melepaskan diri dari anarkisme.¹¹⁸

2. Democratic Confederalism Ocalan

Disaat Bookchin tengah berjuang di AS untuk mendapatkan pengakuan terhadap pentingnya teori ekologi miliknya pada tahun 1970-an, PKK pada saat yang sama juga berjuang dengan ide ekologi sosial mereka. PKK terinspirasi oleh pemikiran Marxis-Leninis dan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara Kurdi yang akan didirikan berdasar pada prinsip-prinsip sosialis. Tanah air Kurdi telah terbagi dalam empat bagian negara modern saat ini, yaitu Turki, Iran,

¹¹⁷ Murray Bookchin and kurdish Resistance, *Op. Cit.*

¹¹⁸ *Ibid.*

Iraq dan Suriah sebagai akibat dari pembagian bekas wilayah Ottoman oleh Inggris dan Perancis. Meskipun PKK berkeinginan untuk mendirikan Kurdistan yang bersatu di empat negara tersebut, namun fokus utama mereka adalah untuk membebaskan daerah Kurdi di Tenggara Turki yang disebut dengan Kurdistan Utara atau *Bakur*.

Setelah Ocalan berhasil ditangkap di Kenya pada tahun 1999, PKK akhirnya mencabut klaim mereka untuk mendapatkan kemerdekaan di Bakur dari pemerintah Turki dan mengubah tuntutan mereka dengan keinginan untuk mendapatkan otonomi di tingkat lokal. Hal ini tidak lain diakibatkan perubahan pemikiran yang dialami oleh Abdullah Ocalan selama dia berada dalam penjaranya di pulau Imrali.

Dari dalam penjara, Ocalan mulai berkenalan dengan karya-karya Bookchin tentang transformasi sosial. Pada Tahun 2002, Ocalan secara intensif mulai membaca karya-karya Bookchin, khususnya *Ecology of Freedom* dan *Urbanization Without City*. Ocalan bahkan menyuruh pengacaranya untuk menghubungi Bookchin dan menganggap dirinya sebagai murid Bookchin pada tahun 2004.¹¹⁹ Tulisan-tulisan Ocalan selanjutnya menunjukkan pengaruh studinya tentang Bookchin.

Tulisan-tulisan Bookchin telah mempengaruhi Ocalan untuk menyerah pada ide negara-bangsa yang merdeka, dan mulai mengejar alternatif baru yang disebutnya sebagai “*democratic confederalism*”. Setelah menganalisis interdependensi kapitalisme dan negara bangsa di satu sisi, dan antara patriarki dan kekuasaan negara yang terpusat pada sisi lainnya, Ocalan menyadari bahwa

¹¹⁹ Bookchin, *Öcalan, and the Dialectics of Democracy, Op. Cit.*

kebebasan dan kemerdekaan yang sebenarnya hanya dapat terjadi setelah gerakan itu memutuskan semua hubungan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kapitalisme dan negara-bangsa.¹²⁰

Dalam pamfletnya pada tahun 2005 yang berjudul “*Declaration of Democratic Confederation*”, Abdullah Ocalan secara resmi memutuskan hubungan dengan aspirasi awal PKK untuk mendirikan negara Kurdi yang merdeka. Menurutnya juga, sistem negara bangsa telah menjadi penghalang serius bagi perkembangan masyarakat, demokrasi dan kebebasan sejak akhir abad ke-20. Dalam pandangan Ocalan, satu-satunya jalan keluar dari krisis di Timur Tengah adalah dengan pembentukan sebuah sistem “*democratic confederal*” yang mana kekuatannya berasal langsung dari rakyat dan bukan dari globalisasi yang berdasarkan negara-bangsa.¹²¹ Hal ini menurutnya dikarenakan baik sistem kapitalis maupun tekanan dari kekuatan-kekuatan imperialis tidak akan menyebabkan demokrasi melainkan untuk melayani kepentingan mereka sendiri.

Menurut Ocalan, *democratic confederalism* adalah semacam aturan atau administrasi yang bisa disebut sebuah administrasi politik non-negara atau demokrasi tanpa negara. Proses pengambilan keputusan yang demokratis tidak harus dibingungkan oleh proses yang dikenal dari administrasi publik. Negara hanya mengatur ketika demokrasi itu memerintah. Negara didirikan atas kekuasaan, sedangkan demokrasi berdiri atas dasar konsensus bersama. Kantor di negara ditetapkan melalui dekrit, meskipun sebagian mungkin dilegitimasi lewat

¹²⁰ Murray Bookchin and kurdish Resistance, *Op. Cit.*

¹²¹ *Ibid.*

pemilihan. Demokrasi menggunakan pemilihan langsung, sedangkan negara menggunakan paksaan sebagai cara yang sah.¹²²

Dalam bukunya, Ocalan juga menuliskan prinsip-prinsip dari *democratic confederation* itu sendiri seperti yang sudah dituliskannya dalam halaman sampul bukunya. Ada lima prinsip utama *democratic confederation* Ocalan, yaitu:¹²³

1. Hak menentukan nasib sendiri dari orang-orang, termasuk hak untuk menjadi negara bagi mereka sendiri. Akan tetapi, dasar negara tidak menambah kebebasan seseorang. Sistem PBB yang berdasarkan pada negara bangsa tidak lagi efisien. Sementara itu, negara bangsa telah menjadi hambatan serius bagi setiap pembangunan sosial. *Democratic confederalism* adalah paradigma kontras dari orang-orang yang tertindas.
2. *Democratic confederalism* adalah paradigma sosial non-negara. Paradigma ini tidak dikontrol oleh negara. Pada saat yang sama, *democratic confederalism* adalah cetak biru organisasi kultural dari sebuah negara demokratis.
3. *Democratic confederalism* berdasarkan atas partisipasi rakyat. Proses pembuatan kebijakan berada di tangan komunitas. Level yang lebih tinggi hanya melayani koordinasi dan implementasi dari keinginan komunitas-komunitas yang masing-masing mengirim delegasinya ke majelis umum. Karena keterbatasan ruang dan waktu, mereka hanya terdiri dari juru bicara dan institusi eksekutif. Namun, pusat utama pembuat kebijakan berada pada institusi masyarakat lokal.

¹²² A. Ocalan. 2011. *Democratic Confederalism*, Cologne: Transmedia Publishing Ltd., hal. 22, diakses pada 15 Maret 2017 jam 9:21 melalui, <http://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2012/09/Ocalan-Democratic-Confederalism.pdf>

¹²³ *Ibid.* hal. 33-34.

4. Di Timur Tengah, demokrasi tidak bisa dipakasakan oleh sistem kapitalis dan kekuatan imperialis yang hanya merusak demokrasi. Penyebaran demokrasi rakyat adalah hal yang mendasar. Ini adalah satu-satunya pendekatan yang bisa mengatasi perbedaan kelompok etnis, agama dan kelas. Hal ini juga berjalan bersama-sama dengan baik dengan struktur konfederasi tradisional masyarakat.
5. *Democratic confederalism* di Kurdistan juga merupakan gerakan anti-nasionalis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hak membela diri bagi orang-orang dengan cara memajukan demokrasi diseluruh bagian Kurdistan tanpa mempertanyakan batas-batas politik. Gerakan ini bermaksud untuk membangun struktur federal di Iran, Turki, Suriah dan Iraq yang terbuka bagi semua etnis Kurdi dan pada saat yang sama membentuk sebuah konfederasi payung untuk semua empat bagian Kurdistan.

Demokrasi bersandar pada partisipasi sukarela, dan konfederasi bersifat fleksibel, multikultural, anti monopoli, berorientasi pada consensus, dan terbuka bagi kelompok atau faksi-faksi politik lainnya. Ekologi dan feminisme adalah pilar utama demokrasi Ocalan ini. Dalam sub-bab buku ini, Ocalan juga menuliskan tentang partisipasi dan perbedaan lansekap politik, warisan masyarakat dan akumulasi pengetahuan historis, etika dan kesadaran politik, *democratic confederalism* dan sistem politik yang demokratis, *democratic confederalism* dan pertahanan diri, *democratic confederalism* melawan hegemoni, dan struktur *democratic confederate* pada skala global.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid.* hal 21-31.

Yang pertama adalah mengenai partisipasi dan perbedaan lansekap politik. Komposisi masyarakat yang berentangan menurut Ocalan memerlukan kelompok politik yang memiliki formasi vertikal maupun horizontal. kelompok lokal, regional dan pusat harus diseimbangkan dengan cara tersebut. Hal ini dikarenakan hanya merekalah yang mampu menangani situasi konkret yang khusus dan mengembangkan solusi yang tepat untuk menyentuh jauh ke dalam permasalahan sosial.¹²⁵

Democratic confederalism bertumpu pada pengalaman sejarah masyarakat dan warisan kolektif mereka. Artinya *democratic confederalism* bukan sistem politik modern yang sewenang-wenang, melainkan akumulasi sejarah dan pengalaman yang diwariskan dari kehidupan masyarakat. Sedangkan negara terus berorientasi terhadap sentralisme untuk mengejar kepentingan monopoli kekuasaan, berbeda dengan konfederalisme yang fokusnya berorientasi pada masyarakat, struktur heterogen masyarakat bertentangan sentralisme. Sentralisme yang berbeda hanya menghasilkan gejolak sosial.¹²⁶

Dalam setiap pikirannya, manusia selalu membentuk kelompok longgar dari suku atau komunitas lainnya. Dengan cara ini mereka mampu menjaga otonomi internal mereka. Ocalan mencontohkan dengan pemerintahan internal kerajaan yang menggunakan metode beragam dari administrasi diri sendiri untuk bagian-bagian yang berbeda, termasuk otoritas keagamaan, dewan suku, kerajaan, dan bahkan republik. Oleh karena itu penting untuk memahami, bahkan kerajaan yang bersifat sentralis sekalipun mengikuti struktur organisasi konfederasi. Model

¹²⁵ *Ibid.* hal. 22

¹²⁶ *Ibidi.* Hal. 23

sentralis bukanlah model administrasi yang diinginkan oleh masyarakat. Sebaliknya, model ini cenderung “melestarikan” kekuatan monopoli itu sendiri.¹²⁷

Selanjutnya Ocalan menjelaskan tentang Etika dan kesadaran politik. Menurutnya, klasifikasi masyarakat dalam kategori dan istilah tertentu dibuat oleh monopoli kapitalist. Keterasingan masyarakat dari keberadaannya mendorong partisipasi aktif, sebuah reaksi yang seringkali disebut sebagai kekecewaan politik. Proyek “modernitas demokrasi” yang ditawarkan oleh PKK menurut Ocalan dimaksudkan sebagai rancangan alternatif. Hal ini didasarkan pada *democratic confederalism* sebagai paradigma politik yang mendasar. Modernitas demokratik adalah atap bagi masyarakat politik yang berdasarkan etika. Selama kita percaya bahwa masyarakat perlu menjadi entitas monolitik yang homogen, maka akan sangat sulit untuk memahami konfederalisme.¹²⁸

Berbeda dengan pemahaman sentralis dan birokratis tentang administrasi dan pelaksanaan kekuasaan, konfederalisme merupakan sebuah politik *self-administration* dimana semua kelompok masyarakat dan identitas kultural bisa mengekspresikan diri mereka sendiri dalam pertemuan lokal, konvensi umum dan majelis. Pemahaman tentang demokrasi ini membuka ruang politik untuk semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Ocalan, tanpa adanya politik maka krisis negara tidak akan bisa diselesaikan karena krisis ini dipicu oleh Kurangnya representasi dari masyarakat politik. Karena itu, diperlukan demokrasi partisipatif dimana semua kelompok sosial dan politik, komunitas keagamaan, ataupun kaum intelektual bisa mengekspresikan diri mereka secara langsung

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.* hal 24-25.

dalam semua proses pembuatan kebijakan lokal. Semakin besar partisipasi, maka akan semakin kuat demokrasi ini.¹²⁹

Ocalan juga membahas hubungan antara *democratic confederalism* dengan *self-defence*. Menurutnya, negara adalah badan militer yang terstruktur, yang pada kenyataannya merupakan produk-produk dari semua jenis peperangan eksternal maupun internal. Aplikasi fasis yang paling nyata adalah negara itu sendiri. Karena itu, Ocalan menawarkan alternative baru yang disebutnya pertahanan diri sendiri atau *self-defence*. Masyarakat tanpa mekanisme pertahanan diri kehilangan identitas, kemampuan untuk mengambil keputusan yang demokratis, dan sifat politik mereka. Pertahanan diri masyarakat tidak terbatas pada dimensi militer saja, melainkan juga pemeliharaan identitas, kesadaran politik, dan proses demokratisasi. *Democratic confederalism* bisa disebut sebagai sistem pertahanan diri masyarakat. Hanya dengan bantuan jaringan konfederasi-lah maka akan mampu menentang dominasi global monopoli dan militerisme negara-bangsa.¹³⁰

Berhubungan dengan hegemoni, dalam *democratic confederalism* tidak ada ruang untuk setiap jenis perjuangan untuk hegemoni, atau dengan kata lain *democratic confederalism* menolak adanya hegemoni itu sendiri. Hal ini Berbeda dengan pemahaman tentang kepemimpinan dalam modernitas kapitalis dimana keputusan birokrasi yang menjadi karakter negara-bangsa bertentangan dengan kepemimpinan konfederasi demokratis yang berdasarkan pada etika. Dalam *democratic confederalism*, lembaga kepemimpinan tidak memerlukan legitimasi ideologis yang membuatnya tidak perlu berusaha mengejar hegemoni.¹³¹

¹²⁹ *Ibid.* 26.

¹³⁰ *Ibid.* hal. 28-29.

¹³¹ *Ibid.* hal. 30.

Terakhir, Ocalan menjelaskan mengenai struktur *democratic confederalism* pada skala global. Ocalan menulis, bahwa meskipun *democratic confederalism* berfokus pada tingkat lokal, pengorganisasian konfederalisme secara global juga tidak dikecualikan. Sebaliknya, menurut Ocalan diperlukan sebuah program masyarakat sipil nasional dalam majelis konfederasi untuk menentang PBB sebagai asosiasi negara-bangsa yang berada dibawah kepemimpinan negara adidaya. Dengan cara inilah kemungkinan akan didapatkan keputusan yang lebih baik dengan tujuan untuk mencapai perdamaian, ekologi, serta keadilan dan produktivitas di dunia.¹³²

C. RESTRUKTURISASI PKK

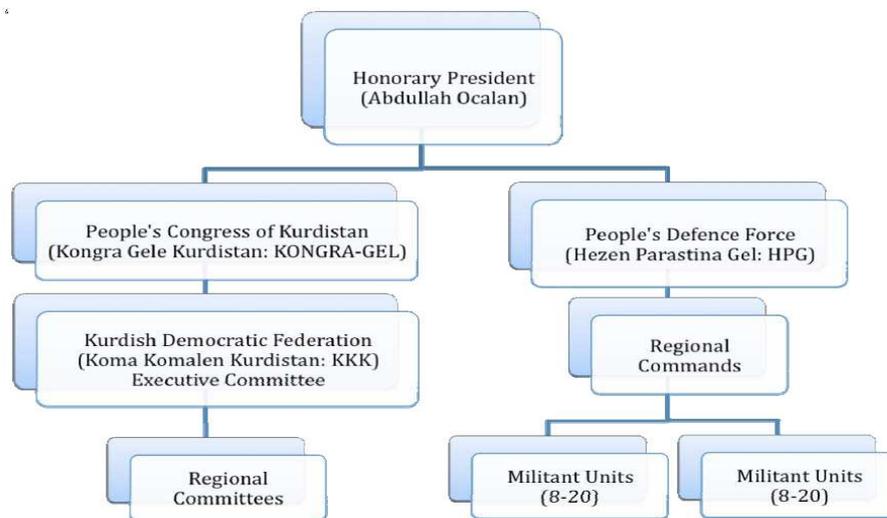
1. Dari PKK ke KCK

Telah disinggung sebelumnya bahwa PKK telah beberapa kali mengalami perubahan, baik itu dari segi nama hingga strukturnya. Perubahan ini terjadi dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah karena tertangkapnya Ocalan pada tahun 1999 yang pada akhirnya juga menjadi faktor yang penting sebagai penyebab berubahnya orientasi dan tujuan PKK. Akan tetapi, yang membuat sukses perubahan ini tidak lain karena lemahnya oposisi internal PKK yang menentang. Tahun 2005 merupakan tahun yang mengawali perubahan drastis PKK. Pada tahun ini lah PKK mulai berjuang berdasarkan paradigma ekologis, feminimis dan masyarakat yang diserukan oleh Ocalan. PKK mulai menyiapkan gerakan perempuan, pemuda, serta komune-komune petani dan majelis di desa-desa di Kurdistan dengan tujuan untuk membangun konfederalisme.

¹³² *Ibid.* hal. 31.

Tekanan dari pemerintah Turki terhadap Uni Eropa dan AS untuk memberikan label teroris terhadap PKK dan memasukkannya kedalam daftar kelompok teroris membuat PKK berada dalam posisi yang sulit. Karena itu, PKK mengubah namanya menjadi KADEK pada tahun 2002 dan kembali dirubah oleh Ocalan menjadi KKK (*Koma Komalen Kurdistan*) pada 2004. Perubahan nama ini memiliki nilai politis tersendiri, karena nama PKK saat ini telah terkenal di dunia sebagai sebuah organisasi teroris berdarah dingin yang haus akan kekuasaan, yang membedakannya dengan tujuan baru mereka ini. Perubahan struktur ini bisa dilihat dari tabel berikut:¹³³

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PKK 2005



Sumber: Jane's World Insurgency and Terrorism, "PKK

¹³³ Jane's World Insurgency and Terrorism, *Op. Cit.*

Pada Februari tahun 2005, PKK mereorganisasi kembali strukturnya dibawah petunjuk Ocalan. Berdasarkan ilustrasi diatas, bisa dilihat bahwa *The People's Congress of Kurdistan* atau KONGRA-GEL adalah badan pembuat undang-undang dan berkuasa atas *Kurdish Democratic Federaion* atau KKK. KKK adalah komite eksekutif baru yang terdiri dari serangkaian komite regional hirarkis. Komite regional dibentuk berikatan dengan struktur hukum dan pemerintahan negara dimana Kurdi tinggal.

Karena komite regional dibentuk di negara dimana Etnis Kurdi tinggal, maka komite-komite ini secara teori mengatur hubungan antar warga negara Kurdi di negara dimana komite tersebut didirikan sehingga Etnis Kurdi bisa hidup sebagai anggota badan otonom atau independen. Meskipun demikian, rancangan ini pada akhirnya tidak pernah dipraktekkan.¹³⁴ Terakhir adalah *People's Defense Force* atau *Hezen Parastina Gel* (HPG) yang merupakan badan untuk para militan PKK. HPG dibagi lagi menjadi komando regional yang terdiri dari 8 hingga 20 militan.

Meskipun transformasi PKK ini tercapai pada tahun 2005, namun tidak ada yang berubah dalam realitasnya karena transformasi ini bergantung pada pendirian komite-komite regional dengan kekuatan politik yang cukup besar dalam sistem hukum negara-negara. Transformasi PKK ini nyatanya tidak memberikan banyak perubahan dalam praktek.

Transformasi PKK menjadi KADEK ternyata meninggalkan gap ideologi dalam organisasi. Hasilnya, KADEK memasuki tahapan yang menurut istilah

¹³⁴ Jane's World Insurgency and Terrorism, *Op. Cit.*

Akkaya dan Jongerden “*shock and retreat*”.¹³⁵ Ocalan yang saat itu berada dalam penjara berikir keras mengevaluasi kegagalan PKK sebelumnya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Etnis Kurdi di Turki dan berusaha untuk mengembangkan pemikiran baru agar organisasinya tidak hancur. Akhirnya menanggapi kebuntuan ini, Ocalan akhirnya kembali mengubah KADEK yang namanya telah diganti dengan KKK menjadi *Kurdistan Communities Association* atau *Koma Civaken Kurdistan* (KCK) dengan pemikiran barunya yang disebut *democratic autonomy*.¹³⁶

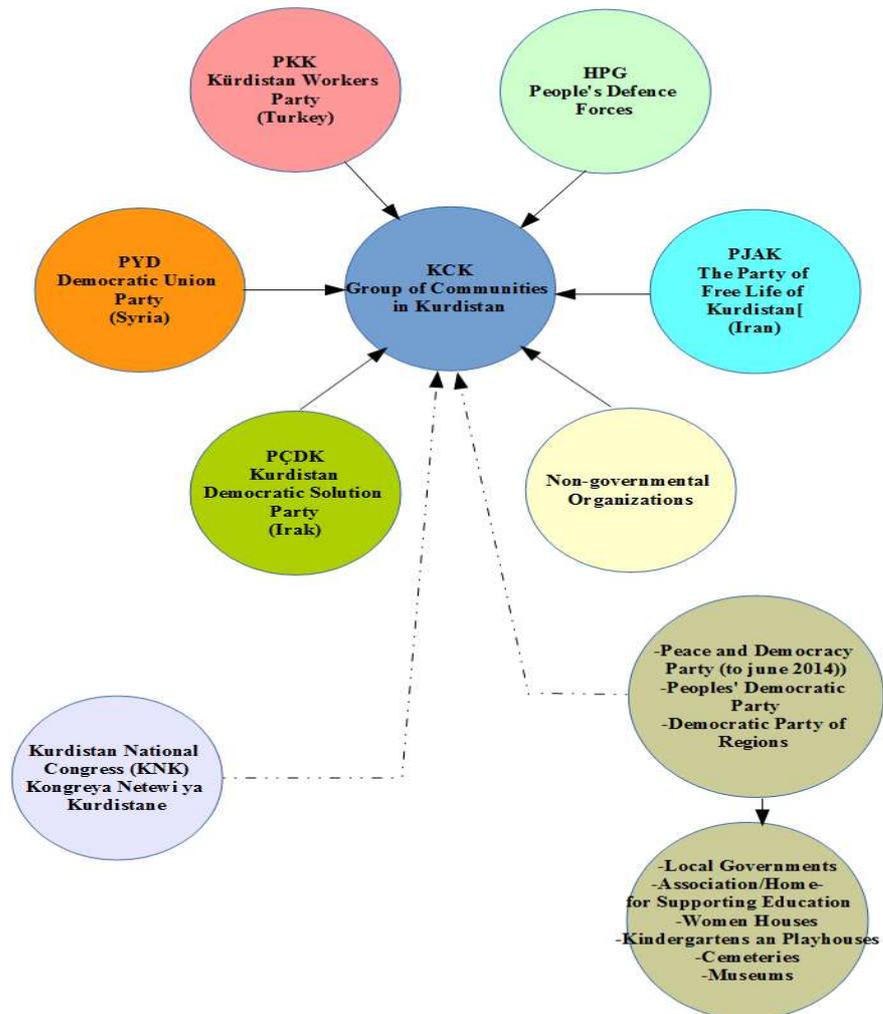
KCK saat ini adalah sebuah organisasi payung yang terdiri dari PKK, PJAK, PYD, dan PCDK. Kelompok ini berdiri setelah disetujuinya kontrak KCK atau “*KCK Agreement*” pada bulan Mei 2010. KCK merupakan model yang lebih komprehensif dan sistematis dari *Koma Komalen Kurdistan* atau KKK yang telah lebih dulu didirikan oleh Ocalan pada tahun 2005.¹³⁷ KCK sendiri mulai diatur paska tertangkapnya Ocalan pada tahun 1999 dan merupakan upaya baru bagi etnis Kurdi untuk mendapatkan kebebasannya melalui jalan politik. Berikut merupakan struktur dan keanggotaan KCK:

¹³⁵ Jongerden, J. and Akkaya, A., H. 2012. *The Kurdistan Workers Party and a New Left in Turkey: Analysis of the Revolutionary Movement in Turkey Through the PKK's* memorial text on Haki Karer. *European Journal of Turkish Studies*; Online: <http://ejts.revues.org/4613>

¹³⁶ Deklarasi ini dimulai pada tahun 2011 melalui *draft* yang dibuat oleh organisasi payung KCK, DTK di Turki. Lihat, <http://www.kurdishinfo.com/wp-content/uploads/Democratik-Autonomy-Project-DTK.pdf>

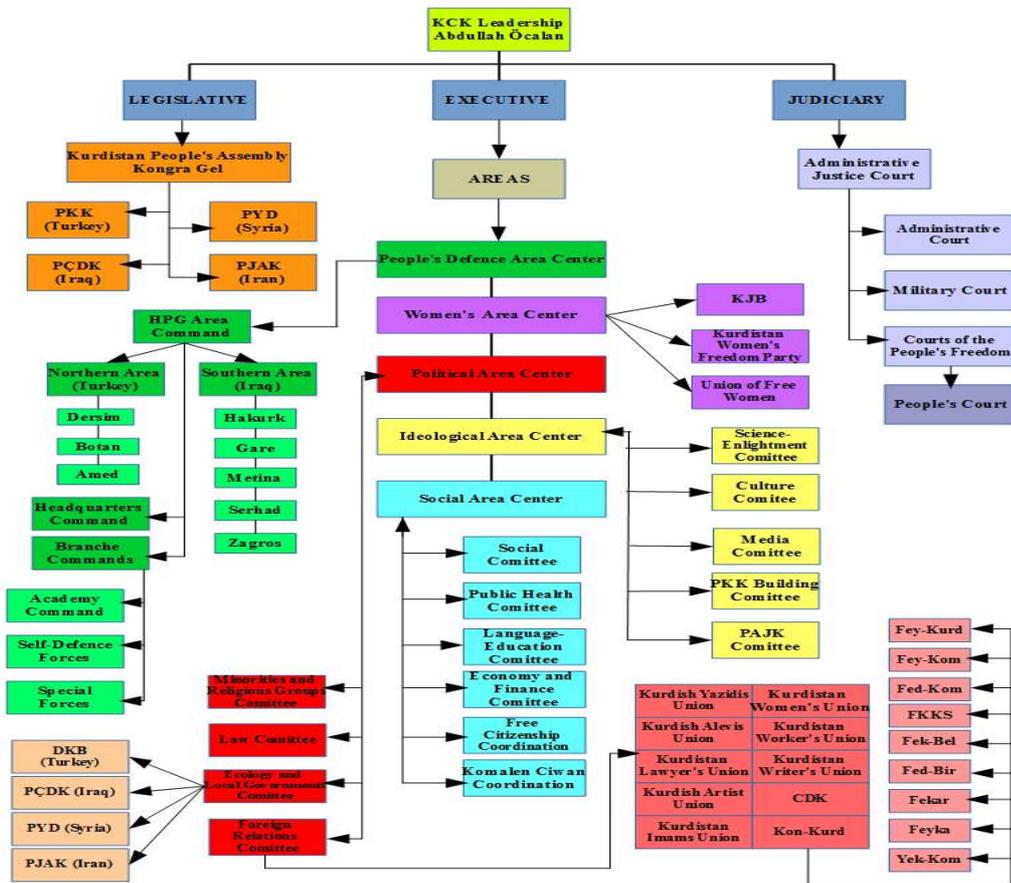
¹³⁷ *Koma Komalên Kurdistan Sözlüşmesi*, Serxwebun, dalam *Journal of Studies in Social Science*, volume 10, nomor. 2, tahun 2015. diakses pada Senin, 20 Maret 2017 jam 14:30 melalui, <http://www.serxwebun.org/arsiv/282/#/18/>

Gambar 4.2. keanggotaan KCK



Sumber: Rodi Hevian, "The Main Kurdish Political Parties in Iran, Iraq, Syria, and Turkey: A Research Guide", Middle East Review of International Affairs, 17-2 (Summer 2013): 107.

Gambar 4.3. Struktur Organisasi KCK



Sumber: CK Indictment, 2012/123 case numbered" accepted by special authorized Istanbul 15th High Criminal Court.

Pada gambar diatas, terlihat bahwa KCK terdiri dari empat partai Kurdi di empat wilayah Kurdistan, yaitu PKK di Turki, PYD di Suriah, PJAK di Iran, dan PCDK di Irak yang tergabung dalam organisasi legislative tertinggi, Kongra-Gel. Sesuai dengan kontrak KCK, Kongra-Gel terdiri dari 300 anggota dua tahun sekali oleh masyarakat KCK. Badan eksekutif merupakan badan tertinggi dalam KCK yang tugasnya adalah untuk melakukan resolusi dari Abdullah Ocalan dan Kongra-Gel, dan dikontrol oleh pasukan PKK yang berbasis di pegunungan Timur dan Tenggara Anatolia. Dewan eksekutif terdiri dari satu presiden dan 30 anggota

yang dipilih dua kali pertahun, dimana presiden ditugaskan langsung oleh Ocalan atas persetujuan Kongra-Gel.¹³⁸

Yang terakhir adalah badan yudisial yang terdiri dari tiga pengadilan yang berbeda, yaitu *the courts of people's freedom*, *the superior military courts* dan *administrative court*. *The courts of people's freedom* memiliki sub pengadilan yang disebut *the people's courts* yang bertugas untuk menangani masalah antara orang-orang, serangan terhadap keamanan hidup dan property, dan penyelesaian permasalahan serius yang menyangkut ekonomi, politik, sosial dan budaya. *the superior military courts* bertanggung jawab untuk menangani kejahatan yang berada dalam lingkup sayap bersenjata organisasi KCK. Dan *administrative court* sendiri bertanggung jawab untuk menyelesaikan kejahatan dalam administrasi, seperti penyalahgunaan misi administrasi, dan pelanggaran disiplin yang terjadi dalam cabang umum organisasi KCK.¹³⁹

Selanjutnya ada lima prinsip yang tertulis dalam bagian KCK *agreement*:¹⁴⁰

1. dimensi politik: prinsip tentang pembentukan penentuan nasib sendiri dan representasi dari pemerintah Kurdistan.
2. dimensi kedaulatan: Legislatif, eksekutif dan yudikatif, perpajakan dan perwakilan diplomatik.
3. Dimensi hukum: Yurisdiksi serta hak-hak sipil dan kebebasan.
4. Dimensi sosial: penataan sosial

¹³⁸ diakses pada Senin, 20 Maret 2017 jam 14:30 melalui, <http://www.bilgesam.org/en/incele/1415/-the-structure-and-activities-of-the-kck-terrorist-organization/#.WM9wzWsxXIU>

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Koma Civaken Kurdistan Contract*, diakses pada Senin, 20 Maret 2017 jam 14:30 melalui, <http://rojbas1.files.wordpress.com/2011/10/koma-civakc3aan-kurdistan.pdf>

5. Dimensi militer: Pasukan pertahanan diri dan lokasi dari PKK dan HPG atau *People's Defense Force*.

Restrukturisasi PKK ke KCK ini secara tidak langsung membuat PKK meninggalkan tujuan dan orientasi awal mereka untuk mendapatkan kemerdekaan di Bakur. Adapun tujuan utama KCK adalah memanfaatkan kekuasaan politik lokal di Timur dan Tenggara Anatolia, Turki. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan dominasi penuh di wilayah-wilayah ini melalui interaksi dengan entitas Kurdi setempat. Hal ini diperjelas dalam artikel 6 dari kata pengantar kontrak KCK yang berbunyi:¹⁴¹

“For the self-determination of Kurdistan, this movement aims not to establish a nationalist state but to establish its own democracy that will be grounded on no political borders. All Kurds will come together for establishing their own federation and unite for confederation in case of the emergence of a Kurdish structure in Turkey, Iran, and Syria and even in Iraq.”

Dari paragraf diatas jelas bahwa tujuan baru PKK setelah menjadi bagian dari KCK adalah untuk mendirikan demokrasi bagi seluruh etnis Kurdi di empat wilayah Kurdistan melalui konfederasi. Dibentuknya KCK berarti pula pelaksanaan ide *democratic confederalism* yang dibuat oleh Ocalan. Untuk mewujudkan ide ini sudah jelas bahwa perjuangan bersenjata seperti dulu tidak akan menghasilkan apapun melainkan kegagalan berikutnya bagi PKK. Karena itu, mereka memulai perjuangan baru melalui jalur politik untuk mencapai tujuan baru mereka ini.

¹⁴¹ Dalam Journal of Studies in Social Sciences, diakses pada 11 Maret 2017 jam 14:30 melalui, <http://infinitypress.info/index.php/jsss/article/viewFile/1020/454>

2. Dari Independen menjadi “Konfederasi”

Dalam catatannya di penjara, Ocalan mengaku bahwa memang merupakan keputusan yang sangat sulit untuk keluar dari pikiran untuk mendapatkan negara yang merdeka bagi etnis Kurdi. Hal ini tidak lain dikarenakan fakta sejarah Kurdi, dimana mereka memimpikan mempunyai negara sama halnya dengan bangsa-bangsa lainnya yang hingga beberapa dekade hingga saat ini tidak pernah terwujud karena semua partai politik Kurdi tidak memiliki kekuatan untuk menyerukan keinginan ini.

Akan tetapi PKK tidak pernah berhenti bermimpi untuk mendapatkan kebebasan bagi etnis Kurdi di Turki. Malahan, PKK muncul dengan ide baru yang lebih menjanjikan, yaitu keinginan untuk membentuk masyarakat Kurdi yang bebas dan demokratis di seluruh daerah Kurdistan. Perubahan ideologi dan kebijakan ini secara umum datang dari catatan dan buku yang ditulis oleh Abdullah ocalan selama dia berada di dalam penjara.

Memang agak sedikit sulit untuk memahami istilah konfederasi yang dikemukakan oleh Ocalan. Hal ini dikarenakan konfederasi Ocalan bukan merujuk pada konfederasi negara-negara. Yang jelas, konfederasi Ocalan itu adalah pemikiran yang sama dengan filosof *eco-anarchist* asal New York, Murray Bookchin. Seperti yang telah disebutkan bahwa tujuan KCK adalah sebuah tujuan *utopian* untuk menciptakan “konfederasi” demokratis global dan meninggalkan sistem negara bangsa. Untuk itulah langkah awal yang mereka lakukan adalah dengan mendirikan *democratic autonomy* di Timur Tengah yang dimulai dari Kurdi.

Tujuan baru PKK ini jelas berbeda dengan tujuan awal yang menginginkan kemerdekaan dan pendirian sebuah negara Kurdi yang merdeka. Bahkan, PKK mengincar tujuan yang sedikit berbeda, yaitu keinginan untuk mendirikan sebuah sistem demokratis bagi orang-orang yang tidak memiliki negara. Etnis Kurdi di empat wilayah Kurdistan akan membentuk konfederasi dan bukan sebuah negara. Menurut Ocalan juga, mereka akan mengakui kedaulatan negara bangsa ketika negara bangsa mengakui kedaulatan Kurdi.

Perubahan PKK ke KCK membuat organisasi ini fokus untuk membuat aturan yang berdasarkan *democratic confederalism*. Mereka bahkan membuat *democratic confederal law* yang terdapat dalam *KCK agreement* halaman 4, bagian 7. Berdasarkan hal ini, Ocalan menyebutkan tentang tiga sistem hirarkis legal yang dijunjung oleh KCK. Yang pertama adalah hukum Uni Eropa, hukum negara bangsa dan yang terakhir hukum “*democratic confederal*”.¹⁴²

Secara realistis, sistem ini akan memiliki kesempatan untuk diimplementasikan jika pemerintah Turki bergabung dengan Uni Eropa. Pada intinya, satu-satunya kesempatan untuk menerapkan hukum “konfederal” ini adalah melalui masyarakat demokratis konfederasi yang tidak lain merupakan sistem KCK itu sendiri. Dari hal ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa daripada menuntut *democratic autonomy*, Ocalan lebih fokus untuk mendapatkan pengakuan dari negara bangsa untuk mendirikan aturan PKK/KCK ini di wilayah yang dihuni oleh etnis Kurdi.

¹⁴² *Ibid.*

3. Pembentukan *Democratic Society Congress* (DTK)

Sejak berdirinya KCK, seluruh strategi dan taktik gerakan nasional Kurdi berada dalam pengawasan organisasi ini, termasuk PKK yang merupakan anggota dari KCK. Hal ini berikutnya berimbas pada tujuan dan orientasi PKK. sejak tahun 2005, telah banyak dilakukan diskusi dalam internal KCK mengenai pengembangan "republik demokratis", *democratic confederalism*, dan *democratic autonomy* yang disarankan oleh KCK. Diskusi-diskusi ini dilakukan di Turki melalui organisasi payung yang disebut *democratic society congress*.

Democratic society congress atau *Demokratik Topluluk Kongresi* adalah sebuah platform asosiasi dan gerakan Kurdi yang telah mencanangkan pemerintahan demokratis sendiri. 850 delegasi DTK pertama kali bertemu pada 14 Juli di Amed, ibukota dari Kurdistan Utara. Model otonomi demokratis dibangun untuk menyadarkan pemerintah melalui demokrasi serta sebagai respon atas tidak diakuiannya status sosial Kurdi. Untuk itu, DTK telah menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengakui hak tersebut melalui pernyataannya:¹⁴³

"In the light of international conventions on human, respect for the territorial integrity of a common land and the prospect of a democratic nation, we, the Kurdish people, pledge our Democratic Autonomy, as well as national commitment to unity of the peoples of Turkey"

DTK adalah payung utama bagi aktivitas KCK di Turki. Gerakan ini menekankan bahwa otonomi mereka ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan negara dan membangun negara lainnya. Bagi DTK, otonomi bukanlah sistem negara demokratis, melainkan sebuah sistem dimana orang-orang Kurdi bisa memerintah diri mereka sendiri.

¹⁴³ diakses pada Senin, 20 Maret 2017 jam 14:30 melalui, http://en.hdpeurope.com/?page_id=912

Dibentuknya DTK merupakan bentuk tekad PKK akan solusi *democratic autonomy* mereka. Model yang konkret tentang *democratic autonomy* ini dapat dilihat pada *draft* proposal yang diajukan oleh DTK pada tahun 2011. Menurut DTK sendiri, *democratic autonomy* ini tidak hanya akan menyelesaikan permasalahan Turki dan Kurdi, namun juga akan mendirikan sebuah struktur politik demokratis yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Turki. Otonomi ini selanjutnya bertujuan untuk menyelesaikan semua isu termasuk isu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai *libertarian-communal*. Adapun isi dari *draft* ini terdiri dari beberapa delapan tujuan utama, yaitu politik, hukum, *self-defence*, sosial, ekonomi, kultural, ekologi dan diplomasi, yang semuanya bertujuan untuk membangkitkan tekad politik dan berakhir pada pembentukan sebuah otonomi demokratis Kurdistan.¹⁴⁴

Dari *draft* DTK ini, kembali tegaskan bahwa tujuan PKK adalah untuk menciptakan sebuah daerah otonomi di Kurdistan, yang dalam hal ini fokusnya adalah Kurdistan Utara atau Bakur di Turki. Dalam *draft* ini juga disebutkan bahwa otonomi ini akan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai *libertarian-communal* yang tidak lain merupakan perspektif *democratic confederation* hasil modifikasi Ocalan terhadap pemikiran *libertarian municipality* Murray Bookchin. Menurut *draft* ini juga, *democratic autonomy* tidak akan mengubah batas-batas negara. Sebaliknya, *democratic autonomy* akan menguatkan persaudaraan dan persatuan yang pada akhirnya akan menghentikan konflik karena otonomi demokratis ini bukan lah pelebagaan sebuah negara. *Democratic autonomy* adalah ekspresi dari keinginan etnis Kurdi di Kurdistan

¹⁴⁴ Diakses pada Senin, 20 Maret 2017 jam 15:30 melalui, http://demokratischeautonomie.blogspot.eu/files/2012/10/DTK.engl_.pdf

Utara, yang nantinya juga akan membentuk ikatan dengan organisasi “konfederal demokratis” di bagian Kurdistan lainnya tanpa mengubah batas-batas negara dimana mereka tinggal.¹⁴⁵

Akhirnya, Orientasi baru ini kembali diperkuat dengan dicituskannya *declaration on self-rule* setelah berakhirnya dua hari pertemuan majelis umum DTK di Kurdistan Utara atau Diyarbakir pada Desember 2015 dengan hasil final yang diberi nama “*Declaration of political resolution regarding self-rule*”. Ada 14 poin penting dari hasil pertemuan ini yang harus diwujudkan, yaitu:¹⁴⁶

1. Pembentukan wilayah otonomi melibatkan beberapa provinsi tetangga atas pertimbangan kedekatan budaya, ekonomi, dan geografis.
2. Pemerintahan semua daerah dan otonomi ini oleh badan *self-governnance* dipilih dari majelis yang dibentuk dalam sebuah inti demokrasi, dan dalam lingkup prinsip-prinsip dasar konstitusi demokratis baru negara Turki. Adanya representasi dari daerah otonomi di TBMM (*Grand National Assembly of Turkey*) dan administrasi terpusat atas dasar prinsip-prinsip demokrasi.
3. Mengakhiri semua jenis pengawasan dari administrasi pusat terhadap daerah otonomi demokratis, kecuali unit administrasi lain yang ditentukan menurut konstitusi demokrasi yang baru. Penghapusan kewenangan pemberhentian orang yang telah terpilih menempati suatu posisi.
4. Memastikan partisipasi kota, desa, pemuda, perempuan dan kelompok keagamaan di majelis otonomi daerah dalam hal proses pembuatan kebijakan.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ DTK – *Declaration of political resolution regarding self-rule*, diakses pada 21 Maret 2017 jam 20:01 melalui, <http://en.hdpeurope.com/?p=2402>

5. Kemajuan dan perluasan demokrasi, perwakilan yang sama dari perempuan dalam majelis, semua mekanisme dan tahap pembuatan kebijakan *self-governance* dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang bebas dan demokratis. Pemberian kewenangan bagi perempuan untuk membentuk majelis, komune, dan struktur sosial sesuai kebutuhan; persetujuan terhadap majelis perempuan disetiap keputusan mengenai perempuan; pengakuan hak perempuan pada organisasi otonomi di seluruh wilayah.
6. Partisipasi pemuda dalam pembuatan keputusan dan mekanisme *self-rule*.
7. Pengaturan pendidikan dengan *self-administration*; penyediaan pendidikan semua bahasa diluar bahasa Turki; amandemen kurikulum sejalan dengan konstitusi demokrasi yang baru, nilai-nilai universal, hak asasi manusia, sejarah lokal, perbedaan budaya dan sosial; pengakuan bahasa lain selain bahasa Turki sebagai bahasa resmi.
8. Pemberian kesempatan bekerja dan studi di bidang bahasa, sejarah, dan budaya; organisasi tempat beribadah adalah institusi otonomi
9. Penyediaan pelayanan medis dan kesehatan oleh pemerintah otonom.
10. Pengaturan kembali sistem peradilan dan hukum sesuai dengan model otonomi daerah.
11. Otorisasi dari pemerintah daerah otonom untuk operasi dan pengawasan wilayah, sumber energi dan pembagian produksi; pembentukan dan pengembangan produksi dan operasi unit di semua bidang seperti pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan sesuai dengan prinsip-

prinsip umum konstitusi demokrasi; dukungan, promosi dan sumbangan dari inisiatif semua individu.

12. Penyediaan dan pengawasan transportasi darat, air dan udara oleh pemerintah otonom.

Penataan pelayanan lalu lintas oleh otoritas lokal sesuai dengan institusi pusat yang terkait.

13. Penetapan anggaran lokal untuk administrasi daerah otonomi dalam rangka penyediaan layanan yang telah disebutkan sebelumnya; kepercayaan pada anggaran yang berorientasi pada perempuan; pengumpulan pajak oleh unit *self-governance* dalam kewajibannya terhadap perjanjian dan prinsip-prinsip persamaan yang diputuskan bersama pemerintah pusat dan administrasi lokal lainnya; pembagian dari total penerimaan pajak oleh pemerintah pusat kepada pemerintah lokal, realisasi tindakan yang diperlukan oleh pemerintah pusat untuk menghilangkan perbedaan tingkat pembangunan di daerah setempat.

14. Pembentukan unit keamanan lokal yang resmi dibawah pemerintah otonomi regional, pengaturan kerja yang terkoordinasi diantara unit pertahanan dan keamanan lokal dengan pusat.